



Kontribusi Peran Perempuan dalam Membangun Perekonomian sebagai Penguatan Kesetaraan Gender di Indonesia

Muhamad Rahman Bayumi

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
muhamadrahmanbayumi_uin@radenfatah.ac.id

Rizal Alfit Jaya

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
rizal.aj1104@gmail.com

Bunga Maratush Shalihah

Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
bungamaratushshalihah_uin@radenfatah.ac.id

Diterima: 8-11-2022

Direvisi :28-11-2022

Diterbitkan: 30-12-2022

Abstract

Gender equality is a complex problem whose studies are not limited to social aspects, but will also be related to economic, political, cultural, religious, and scientific aspects. Women are often misunderstood in life, namely women are considered no better and have the right than men, both to get positions in the private, public and state spheres. This paper describes the role and contribution of women in developing the economy in overcoming actual issues to improve gender achievement in Indonesia. This research is a type of qualitative research, by utilizing secondary data sources in the form of reports, journals, books, and relevant documentation to conduct a literature study in analyzing this problem. The analysis technique in this study uses a descriptive approach. The results of this study describe that women have an important role and contribution in building the economy for the creation of gender in Indonesia.

Keywords: , Economic Development, Gender Equality, and Women

Abstrak

Kesetaraan gender merupakan satu persoalan kompleks yang kajiannya tidak terbatas pada aspek sosial saja, tapi juga akan berkaitan dengan aspek ekonomi, politik, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Keberadaan perempuan seringkali disalah artikan perannya dalam kehidupan, yaitu perempuan dianggap tidak lebih baik dan berhak dari laki-laki, baik untuk mendapatkan posisi di ranah personal, publik dan negara. Tulisan ini memaparkan peran dan kontribusi perempuan dalam membangun perekonomian dalam mengatasi isu aktual untuk penguatan capaian kesetaraan gender di Indonesia. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan sumber data sekunder berupa laporan, jurnal, buku, dan dokumentasi yang relevan untuk melakukan studi literatur dalam menganalisis persoalan ini. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian ini menguraikan bahwa perempuan memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam membangun perekonomian demi tercapainya kesetaraan gender di Indonesia.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Pembangunan Ekonomi, Perempuan.

Pendahuluan

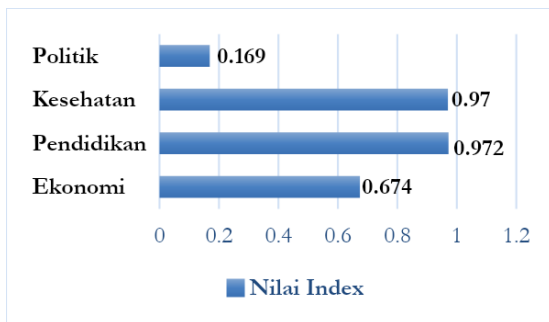
Upaya membangun perekonomian tidak akan pernah lepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (Safri, 2016). Usaha untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut tidak bisa terlepas dari isu gender (Arifin, 2018). Oleh karenanya peran dari kesetaraan gender akan sangat menentukan pembangunan ekonomi yang dapat memberikan dampak yang luas pada masyarakat. Meskipun sudah banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kontrol, manfaat, partisipasi, dan akses, serta kontrol akan sumber daya, seperti pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan bidang lainnya.

kehatan dan pendidikan dapat dilihat bahwa peran perempuan menjadi primadona dan tidak ada kesenjangan yang begitu berarti. Hal ini dapat dilihat bahwa memang perempuan tidak mengalami begitu banyak kendala untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Masalah yang kemudian begitu dapat dilihat yaitu tingginya kesenjangan gender dalam posisi strategis sebagai pemimpin di bidang politik dan ekonomi.

Ketertinggalan dan kesenjangan gender dalam masyarakat menyebabkan munculnya permasalahan yang saling berkaitan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya. Isu pokok yang paling mendasar sebagai upaya peningkatan taraf hidup perempuan yang belum adanya yang mengakomodir akan pentingnya kesetaraan itu sendiri. Sehingga isu ini masih belum bisa dimaknai secara bersama-sama. Ego yang terbentuk dari budaya patriarki masih menjadikan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan berada sangat berbeda jauh, yang mengakibatkan masih banyaknya diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam ranah sosial dan publik seringkali diragukan (Ratih, 2015) maka harus selalu dipromosikan sebagai upaya untuk menekan angka kesenjangan gender yang terjadi. Setiap orang harus dituntut untuk bersama-sama memiliki cara pandang yang adil jika menginginkan terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan nasional dalam segala aspek, khususnya ekonomi bertujuan agar dapat mewujudkan banyaknya kualitas

Tabel 1. Indeks Ketimpangan Gender



Sumber: World Economic Forum
Diakses melalui databoks, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1, terlihat bahwa elemen politik dan ekonomi masih menimbulkan kesenjangan yang besar jika dilihat berbasis gender. Dalam bidang

sumber daya manusia dan terciptanya kesejahteraan rakyat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu poin penting dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Proses ini membutuhkan suatu strategi yang menempatkan rakyat dalam keadaan aktif sebagai aktor yang berperan dalam pembangunan. Memerankan rakyat sebagai aktor berarti memerankan/menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai aktor. Filosofi ini yang kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan melalui strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan ((KPPPA), 2018).

Penelitian ini memaparkan peran perempuan dalam kontribusinya baik bidang ekonomi, politik, dan aspek lainnya dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wacana dalam perumusan kebijakan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam kehidupan di berbagai aspek.

Eksistensi Perempuan Dalam Berbagai Aspek Kehidupan

Pelabelan atau pandangan yang keliru terhadap suatu kelompok kerap terjadi di masyarakat umum baik itu pada masyarakat desa maupun kota. Hal ini tentu sangat berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat terlebih dalam pembangunan ekonomi (Erianjoni, 2014). Maka dari itu konstruksi pemahaman terhadap identitas suatu kelompok perlu dilakukan sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dalam hal ini seperti yang terjadi pada kaum perempuan khususnya di Indonesia, dimana sering dilegitimasi sebagai kaum yang lemah. Padahal bila ditinjau pada fakta sejarah

menunjukkan bahwa banyak tokoh-tokoh perempuan yang menjadi pemimpin, rasional serta terlibat langsung dalam perang melawan penjajahan. Berbagai penelitian dari seluruh negara berkembang secara konsisten menunjukkan bahwa perluasan peluang dan kesempatan memperoleh pendidikan dasar bagi perempuan menunjukkan tingkat pengembalian investasi tertinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lainnya (Amory, 2019).

Pada aspek pendidikan kita mengenal sosok RA Kartini yang memberi inspirasi kepada perempuan untuk berpendidikan sebagai salah satu upaya melawan penindasan terhadap perempuan. Selain itu perempuan Indonesia juga pernah menjabat posisi tertinggi negara sebagai presiden, dan hingga saat ini ada yang menjabat sebagai menteri, hakim, dan anggota legislatif (Rohmaniyah, 2009).

Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum perempuan yang bekerja di luar rumah. Namun secara umum mayoritas ulama memperbolehkan perempuan untuk bekerja, yang penting perempuan tersebut dapat menjaga kehormatannya (Qomar, 2019). Hal ini sangat relevan dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam, karena mencari harta untuk menopang kehidupan keluarga adalah ibadah yang harus ditempuh agar terhindar dari kefakiran dan dapat memberdayakan kualitas keluarga yang baik dari sisi materi, psikis, dan psikologis.

Aktualisasi dari konsep ini telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, istri Rasul Siti Khadijah merupakan pedagang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memberi kesempatan yang sama pada

perempuan dan laki-laki untuk memberikan kontribusi perannya dalam perekonomian (Arafah, 2022).

Perkembangan zaman telah merubah tatanan sosial di masyarakat, dimana arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang kian pesat merubah pola pikir manusia untuk kritis dan terbuka. Dalam konteks eksistensi perempuan masa kini, peran perempuan di dalam kehidupan sosial tidak dapat dipandang sebelah mata. Kondisi ekonomi yang terus membutuhkan sumber daya manusia memberi dampak kepada perempuan untuk terlibat dan berkontribusi di dalamnya.

Meningkatnya Kesempatan perempuan untuk berkontribusi di bidang ekonomi selain dikarenakan kebutuhan tenaga kerja perempuan di bidang-bidang tertentu, juga tingkat pendidikan perempuan saat ini juga mengalami peningkatan (Wahyuni et al., 2021). Dengan keterlibatan perempuan di sektor publik seperti berkarir di bidang ekonomi, politik, teknologi dan lainnya, justru hal ini akan berpengaruh langsung terhadap skil atau karakter kepemimpinan yang dimiliki perempuan tersebut (Reflianto & Wandu, 2019).

Sebagai wujud yang kuat perempuan selalu dipandang sebagai sosok yang memiliki peran ganda, yaitu pada urusan domestik dan ruang publik. Di samping itu pada kondisi apapun kontribusi perempuan selalu mampu memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya. Pada masa pandemi Covid-19 misalnya, di beberapa daerah di Indonesia jumlah wanita yang berkarir baik di dunia kerja maupun usaha perdagangan mengalami peningkatan dibanding laki-laki (Nasrulloh & Hafidh, 2021).

Keadaan ekonomi yang sulit pada saat pandemi mengharuskan kaum perempuan

ikut serta dalam memulihkan kondisi ekonomi keluarga dengan sumber daya yang dimiliki, seperti memanfaatkan perangkat digital untuk berdagang dan bekerja dari rumah, serta mencari keterampilan secara mandiri yang dapat dikomersilkan untuk menambah penghasilan rumah tangga mereka.

Begitu juga halnya pada tahun 1950, dimana kondisi ekonomi saat itu sedang tidak baik, sehingga fenomena migrasi banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Di Yogyakarta misalnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya banyak dari penduduk Yogyakarta yang melakukan migrasi ke daerah Jember dan Banyuwangi untuk bekerja di sektor pertanian. Dan sekitar 50% dari warga Yogyakarta yang bermigrasi adalah perempuan (Refliyanto, 2020). Dengan tekanan kondisi ekonomi saat itu telah merubah cara pandang masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa peran perempuan hanya mengurus rumah tangga menjadi mampu bekerja di luar untuk membangun ekonomi keluarga, meskipun untuk mencari sumber ekonomi dari luar daerah dengan cara migrasi.

Saat ini perbandingan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat langsung atau bekerja masih didominasi oleh laki-laki, tapi seiring berkembangnya zaman, ada banyak tuntutan pekerjaan yang memberi dan membuka kesempatan pada perempuan untuk berkontribusi dalam mengembangkan kemampuannya pada berbagai aspek di ranah publik. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dijadikan sebagai standar untuk melihat kuantitas perempuan dan tingkat *growth* yang bekerja di sektor publik. Selain itu melalui TPAK dapat diketahui seberapa optimal upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan

bagi perempuan menempuh pendidikan dan bekerja di sektor formal sebagai bentuk partisipasi kesetaraan gender (Novianti, 2016).

Konsep dualisme budaya dipandang telah melekat pada perempuan, dimana perempuan dituntut untuk mampu bekerja di ruang publik dan domestik. Pekerjaan domestik yang biasa identik dengan tugas perempuan sebagai seorang ibu, istri, dan mengurus pekerjaan di rumah. Sedangkan pada peran perempuan pada ruang publik dapat berperan sebagaimana pekerjaannya.

Perempuan kadang dihadapkan pada keadaan “*double standar*” yang juga kadang diharuskan untuk memilih peran, padahal hakikatnya perempuan mampu untuk mengambil posisi sebagai multiperan tanpa adanya diskriminasi. Kemampuan perempuan dalam menyeimbangkan segala aspek yang dihadapi adalah keistimewaan yang telah ada sejak lama. Semakin baiknya upaya melibatkan perempuan dalam berbagai sektor akan membantu merubah pola pikir dan persepsi masyarakat akan peran perempuan di era global (Nirmalasari & Putri, 2022).

Fenomena keterlibatan perempuan di ruang publik saat ini tengah hangat diperbincangkan, dan menjadi perhatian oleh berbagai kalangan terutama pengamat sosial, salah satunya Engels mengemukakan bahwa kekuasaan patriarkhal terhadap kaum perempuan dapat dilepaskan, misalnya dari sisi ekonomi apabila perempuan mampu berkontribusi atau dapat memberikan penghasilan yang lebih daripada suami maka dengan demikian kekuasaan, impresi, dominasi, dengan posisi tawar yang baik menjadikan perempuan akan mendapatkan akses yang sama dengan suaminya.

Adapun menurut Geertz pada masyarakat Jawa ia menyebutnya sebagai

fenomena matrifokalitas, di mana laki-laki dan perempuan secara umum memiliki tingkat yang setara di dalam strata sosial. Peran ibu diposisikan dan berkedudukan sangat penting di dalam keluarga, tidak hanya sebatas merawat dan mendidik anaknya atau juga sebagai pendamping suaminya, namun ia juga diberi kesempatan keluar rumah untuk membangun ekonomi keluarganya seperti berdagang atau bekerja (Arafah, 2022).

Peran perempuan selain di bidang ekonomi yang tak kalah penting ialah keterlibatannya di ranah politik, dimana perempuan diharapkan turut berpartisipasi sebagai perwakilan di lembaga legislatif yang akan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan mulai dari legislasi, penentuan anggaran dan pengawasan (Tri Dewiyanti, 2012), sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan berkeadilan terutama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Berbagai Masalah Yang Dihadapi Perempuan Dan Penyebabnya

Persoalan gender masih menjadi pembahasan yang banyak mendapat perhatian publik dari berbagai kalangan, karena isu gender merupakan bagian dari isu yang berhubungan langsung dengan permasalahan sosial di tengah masyarakat saat ini. Kasus ketidaksetaraan gender yang kerap terjadi khususnya pada perempuan dan selalu diberitakan melalui berbagai platform media, mulai dari hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan sebagai perwakilan parlemen (Panjaitan & Purba, 2018).

Hal-hal tersebut telah cukup mengingatkan kepada masyarakat dan pihak berwenang untuk terus berupaya dalam mengatasi permasalahan ini, mulai dari identifikasi masalah dan penyebabnya serta memberikan solusi melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi perempuan saat ini. Di masa pandemi Covid-19 mulai dari tahun 2019 sampai 2020 teridentifikasi tindak kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 450 kasus menjadi 760 kasus (Asman, 2021). Asman di dalam penelitiannya menilai bahwa ada dua faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, yang pertama yaitu permasalahan ekonomi yang dialami keluarga dan yang kedua disebabkan oleh sosial budaya, dalam hal ini adanya ketidaksetaraan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan subordinasi atau menomorduakan kaum perempuan.

Di dalam dunia ketenagakerjaan juga upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender masih belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kesenjangan yang dialami oleh tenaga kerja perempuan baik itu yang berasal dari institusi maupun dari latar belakang sosial budaya (Nuraeni & Suryono, 2021).

Kesenjangan gender yang berasal dari institusi seperti stigma bahwa pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding pekerja laki-laki, anggapan bahwa perempuan hanya dapat melakukan pekerjaan di bidang tertentu, serta pandangan yang dilabelkan pada perempuan kurang produktif

dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan secara sosio-kultural berupa konsep patriarki yang masih dianut di beberapa daerah, perempuan dituntut untuk mengurus keluarga yang dianggap lebih penting daripada berkarir, dan pola asuh keluarga kepada anak perempuan yang belum tepat

Permasalahan gender yang biasa terjadi di masyarakat bila diperhatikan secara luas dapat berakar dari kepercayaan yang dianut atau diyakini oleh masyarakat setempat, seperti kebiasaan yang sudah turun temurun dari orang tua atau nenek moyang, serta doktrin ajaran agama yang diperoleh dari pemuka-pemuka agama tertentu yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Kepercayaan baik yang berasal dari nenek moyang maupun dari ajaran agama tertentu mungkin masih layak dilakukan pada masa lampau, namun untuk saat ini dengan berkembangnya zaman serta tatanan sosial yang terus berubah maka diperlukan kajian yang lebih mendalam yang dapat merekonstruksi sebuah ajaran yang relevan untuk diaplikasikan di kehidupan saat ini.

Di dalam Islam misalnya, terkait permasalahan gender ada perdebatan yang cukup serius antara mufassir tradisional dan mufassir modernis, terutama mengenai masalah-masalah perkawinan, poligami, jilbab, hak-hak perempuan dalam perekonomian, pekerjaan, kewarisan, dan kepemimpinan (Amin, 2019).

Mufassir tradisional berpandangan bahwa teks al-Qur'an bersifat normatif dan secara internal memuat aturan-aturan yang diyakini bahwasanya al-Qur'an mengharuskan perempuan berdiam diri di rumah dan tidak terlibat dalam peran-peran publik, perempuan wajib tunduk terhadap

laki-laki untuk melindungi kelemahan-kelemahan mereka.

Sedangkan kalangan modernis berpendapat bahwa norma-norma al-Qur'an yang berkaitan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga harus dipandang sebagai himbauan etik, bukan sebagai keharusan yang bersifat hukum. Mereka berdalih bahwa al-Qur'an bersifat deskriptif, yakni ungkapan-ungkapannya berbatasan dengan ruang dan waktu, sehingga ketika kondisi sejarah dan sosial mengalami perubahan diperlukan adaptasi baru. Kalangan inilah yang memandang al-Qur'an mendukung integrasi perempuan ke dalam masyarakat, dan hal ini merupakan syarat bagi pemenuhan fungsi-fungsi keluarga (Amin, 2019).

Penguatan Kesetaraan Gender Melalui Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi

Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan penting yang dapat mendukung pemerintah dalam menciptakan negara yang aman, damai, kesejahteraan dan makmur bagi setiap manusia. Cita-cita mulia melalui menciptakan kesetaraan gender haruslah selalu diupayakan, karena ketimpangan dan ketidaksetaraan gender saat ini masih menjadi isu aktual yang belum menemukan cara yang tepat dalam menghentikan masalah berbasis gender tersebut. Berbagai pertemuan lintas ilmu, agama dan ahli hakikatnya dapat merumuskan pola atau konsep dalam menyelesaikan masalah diskriminasi pada perempuan.

Negara Indonesia merupakan wilayah dengan populasi terbanyak ke - 4 di dunia, pada tahun 2020 persentase populasi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki

sebesar 50,58% sedangkan pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk laki-laki menurun menjadi 50,2%. Berdasarkan persentase statistik tersebut, menunjukkan bahwasannya kemajuan dan keseimbangan stabilitas sosial, ekonomi dan politik di dunia ini tidak dapat hanya dikuasai oleh laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2021). Istri Rasul Siti Khadijah sebagai seorang pedagang kaya yang sukses dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kesempatan dan kedudukan yang sama dengan laki-laki di satu sisi, dan juga tidak melupakan tanggung jawabnya di dalam keluarga, sebagaimana laki-laki juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga (Arafah, 2022).

Memprioritaskan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan dapat berakibat pada munculnya ketidakseimbangan peran laki-laki dan perempuan di dunia ini, secara khusus di Indonesia. Perlu adanya kejelasan dan promosi untuk memberikan perempuan untuk berkarya secara produktif karena peran wanita dan laki-laki dalam konstruksi sosial dan budaya berada dalam format yang sama. Kesetaraan haruslah dimaknai sebagai persamaan untuk mencapai kondisi yang sama, satu kedudukan, sejajar, seimbang, dan tidak berat sebelah (Umariana, 2016).

Menghadirkan konsep gender dalam rencana pembangunan ekonomi dan bidang lainnya sudah merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar, pada tataran praktis dan yuridis. Tujuan dari adanya keterlibatan wanita adalah untuk memastikan bahwa hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara efektif dan efisien.

Implementasi konsep gender haruslah memenuhi hal-hal pokok diantaranya mengenai (Hasan, 2016):

1. Meningkatkan peranan dan kedudukan perempuan melalui kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merumuskan kebijakan yang dapat berlaku pada skala nasional dan lembaga yang bisa memperjuangkan terbentuknya kesetaraan gender.
2. Meningkatkan level kualitas dan kemandirian dalam organisasi perempuan dengan tetap berupaya mempertahankan nilai persatuan dan kesatuan serta nilai historis perjuangan kaum perempuan, sebagai upaya meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini membahas keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi, hal ini didasarkan pada fakta bahwa ada banyak negara-negara miskin yang masih begitu tinggi kekerasan berbasis gender pada negara tersebut, contoh negara-negara di benua Afrika, dimana negara tersebut merupakan negara yang miskin dan insiden pemerkosaan terjadi sekitar 66.196 pada setiap 100.000 penduduk (Shintaloka Pradita Sisca, 2021).

Menyikapi hal tersebut maka masalah ketidaksetaraan gender yang terjadi perlu adanya upaya bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi suatu negara dan mencegah dampak negatif dari ketidaksetaraan gender tersebut. Perlu adanya elaborasi lintas ilmu, agama, dan budaya dalam menangani kasus gender tersebut. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk membuat satu konsep penguatan kesetaraan gender dengan mengoptimalkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut perspektif Islam, pembangunan ekonomi merupakan pembangunan manusia secara holistik yaitu

adanya pembangunan pada jasmani, dan mental spiritual. Dalam Islam pembangunan ekonomi difokuskan pada kemaslahatan umat, kualitas sumber daya yang beriman soleh/soleha, terpeliharanya ekosistem alam, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal, serta membayar pajak pada negara (Djumadi, 2016).

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas suatu negara yaitu dengan mengatur dan mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), karena sektor ini memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam membangun ekonomi nasional. Pemberdayaan perempuan pada sektor UMKM diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan (Marthalina, 2018).

Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. Fungsi dan peran UMKM di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Fungsi dan peran secara ekonomi-sosial-politik misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Proporsi UMKM di Indonesia tercatat lebih dari 99%, hal ini menunjukkan bahwa UMKM memegang peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian.

Berdasarkan populasi perempuan di Indonesia yang hampir mencapai setengahnya dari jumlah laki-laki (Badan Pusat Statistik, 2021), maka peran perempuan akan sangat menentukan kemajuan bangsa ini. Sumbangsih perempuan di era global melalui pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor dapat memberikan kontribusi yang

nyata dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan.

Keterlibatan perempuan dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga berdampak pada pemenuhan kesehatan keluarga dan kesejahteraan. Hal ini sudah dibuktikan selama pandemi bahwa banyak kaum perempuan yang menjadi pahlawan ekonomi bagi keluarga. Sosok perempuan yang independen dan tangguh secara ekonomi dapat menjadi pahlawan tidak hanya pada keluarganya tapi juga dapat memberikan kontribusi luas kepada masyarakat. Sehingga Indonesia dapat maju melalui pemberdayaan perempuan (Yoga, 2020).

Keterlibatan perempuan dalam mengontrol stabilitas ekonomi bangsa memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Kemudian munculnya kebutuhan terhadap penerimaan tenaga kerja perempuan pada bidang-bidang tertentu, dan tingkat pendidikan pada perempuan yang semakin meningkat (Novianti, 2016).

Berdasarkan publikasi data mengenai Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar di Indonesia tahun 2014-2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99 persen usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana berdasarkan survei dari Bank Dunia pada 2016 bahwa lebih dari 50 persen usaha kecil dimiliki oleh perempuan (Yoga, 2020).

Dapat disimpulkan keterlibatan perempuan dalam membangun ekonomi yaitu:

1. Berwirausaha baik secara mikro, kecil, menengah, dan besar
2. Mengembangkan industri di daerah dan membuka lapangan pekerjaan
3. Meningkatkan pendapatan

4. Meningkatkan taraf hidup

5. Mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat

6. Membangun kemajuan daerah

Dengan mendukung peran dan keterlibatan perempuan dalam mendukung pembangunan ekonomi diharapkan dapat memosisikan perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Paradigma akan budaya patriarki yang telah tertanam harus menempatkan posisi perempuan pada wilayah yang ideal tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sangat mempengaruhi dalam mendorong kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi politik yang lebih adil dan peka terhadap gender (Abdurrahman & Tusianti, 2021).

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Persoalan Gender: Hambatan dan Tantangan

Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional. Kemajuan dan perkembangan zaman yang dinamis mendorong akan pentingnya peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan demi tercapainya kehidupan yang aman, Makmur, sejahtera, dan makmur. Selain sebagai pembuat kebijakan, pemerintah juga berperan memperbaiki dan mengarahkan segala aktivitas sektor swasta, publik dan mengatur setiap tindak kejahatan yang telah mengganggu pada ranah personal. Stabilitas nasional akan mempengaruhi keseimbangan dan kesetaraan gender.

Upaya membangun negara adalah keharusan bagi pemerintah, dalam penelitian ini sektor ekonomi dapat berdampak pada

banyak aspek kehidupan. Dengan ekonomi yang baik dibuktikan dapat menekan tindak kekerasan dan kejahatan pada suatu Negara. Dapat dilihat suatu fakta bahwa negara Islandia sebagai negara teraman di dunia selama 13 tahun berturut-turut (Landhiani, 2022). Berdasarkan laporan Global Peace Index, Islandia merupakan negara dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah serta memiliki standar hidup yang tinggi, tingkat kepercayaan pada kepolisian juga tinggi, rata-rata penduduknya berpendidikan tinggi, serta populasinya relatif kecil. Tingkat kesenjangan dalam aspek ekonomi dan sosial juga sangat kecil, bahkan di negara tersebut anggota militer dan polisi tidak membawa senjata api.

Singapura merupakan satu-satunya negara yang paling aman di dunia yang masuk dalam peringkat ke 7 (Landhiani, 2022). Peran pemerintah dalam negara tersebut terlihat dari penekanan akibat tindak kriminal dengan hukuman yang sangat berat sehingga membuat kecilnya angka kejahatan pada negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia merupakan negara yang stabil dan mengatur kehidupan untuk berpikir maju serta mandiri. Tarif pajak yang besar, sehingga membuat segala aspek publik terpenuhi dengan baik, seperti masalah Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain.

Dalam setiap sistem perekonomian, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan penting. Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi dalam dunia modern mendorong semakin besarnya peranan pemerintah mengatur jalannya perekonomian. Pemerintah mempunyai peran

untuk mengatur, memperbaiki dan mengarahkan aktivitas sektor swasta.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan memiliki wewenang untuk mengatasi dan menekan peningkatan angka kesetaraan gender melalui upaya-upaya yang melibatkan aspek ekonomi. Namun dalam menjalankan fungsinya seringkali dijumpai berbagai macam hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.

Hambatan dan Solusi dalam menghadapi persoalan berbasis gender yaitu:

1. Penegakan Hukum, lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang menghambat dari pembangunan negara ini. Oknum yang bertugas menegakkan hukum seringkali melanggar hukum, hal ini membuat masyarakat sulit untuk mempercayai.
2. Budaya Hukum, budaya patriarki menjadi satu hambatan karena sudah tertanam di masyarakat. Dominasi pria seringkali disalah artikan yang menimbulkan diskriminasi pada kaum perempuan.
3. Kesadaran Hukum, rendahnya kesadaran hukum disebabkan karena masih banyak fakta ditemukan oknum penegakan hukum menyelewengkan jabatannya, kemudian hukuman yang tidak begitu berat mengakibatkan masyarakat tidak begitu menyadari akan pentingnya patuh terhadap hukum.
4. Kurangnya Integrasi antara Ilmu, Budaya, dan Agama, cara berpikir yang tidak terintegrasi jadi satu hambatan yang nyata dalam merumuskan suatu konsep, peraturan, atau arahan yang akan ditetapkan karena seringkali tidak tepat sasaran.
5. Birokrasi yang berlapis, kerumitan dan berlapisnya birokrasi juga menjadi salah

satu faktor dari lambatnya proses untuk menyelesaikan suatu masalah.

6. Kondisi Ekonomi/Kemiskinan, masyarakat yang miskin juga menjadi hambatan nyata dalam pembangunan suatu negara. Banyaknya masyarakat yang miskin membuat masalah menjadi semakin kompleks dan cenderung menimbulkan masalah baru jika tidak segera diselesaikan.
7. Sosial dan Lingkungan, kedua aspek ini menjadi hal penting yang saling berkaitan dalam menyelesaikan masalah pembangunan ekonomi. Lingkungan dan sosial yang baik dapat mendukung program pembangunan secara efektif dan efisien.
8. Media Sosial, karena hampir semua masyarakat saat ini mengakses internet untuk menggunakan media sosial menjadikan media ini menjadi faktor yang juga dapat menghambat pembangunan karena banyak masyarakat yang menggunakannya tidak bijak. Terbukti dengan tingginya angka kekerasan berbasis gender secara online pada tahun 2021.

Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah pekerjaan besar yang menjadi tantangan sendiri bagi setiap pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dan tidak meratanya pembangunan ekonomi. Pemerintah sebagai ranah yang sangat strategis dalam mengarahkan negara ini harus merumuskan setiap kebijakan yang terintegrasi melalui melibatkan ilmu, agama, dan budaya dalam setiap pengambilan keputusan. Kebijakan yang tidak terintegrasi akan sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Kesimpulan

Kedudukan dan peran perempuan memiliki dampak yang besar di berbagai bidang baik sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Stigma yang melekat pada perempuan menimbulkan problematika sosial yang harus diselesaikan. Perkembangan zaman telah membuat interaksi sosial yang semakin terbuka memberi kesempatan kepada perempuan untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi. Perempuan sebagai sosok yang multi peran baik di ruang domestik maupun publik menunjukkan bahwa mereka bukanlah kaum yang lemah seperti stigma yang melekat pada mereka selama ini. Partisipasi di bidang politik harus diperkuat dengan keterlibatan perempuan untuk menghasilkan kebijakan strategis yang akan berdampak pada pembangunan ekonomi serta menjaga hak-hak perempuan agar terciptanya penguatan kesetaraan gender di Indonesia.

Daftar Pustaka

- (KPPPA), P. P. dan P. A. (2018). *KESETARAAN GENDER: PERLU SINERGI ANTAR KEMENTERIAN / LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, DAN MASYARAKAT*.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinerji-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat>
- Abdurrahman, & Tusianti, E. (2021). Apakah Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi dan Politik Telah Meningkatkan IPM Perempuan Indonesia? *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 204–219.
- Amin, H. J. (2019). Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam. *Buana Gender*, 4(1), 1–13.
- Amory, J. D. S. (2019). PERANAN GENDER PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI SULAWESI BARAT TAHUN 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Arafah, S. (2022). PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK. *Mimikri, Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 8(1), 189–206.
- Arifin, S. (2018). KESETARAAN GENDER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA GENDER EQUALITY AND ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. *Kajian*, 23(1), 27–41.
- Asman. (2021). Inequality of Gender Relations during the COVID-19 Pandemic: A Study of Violence against Women in Sambas, West Kalimantan. *Sanwa: Jurnal Studi Gender*, 16(2), 213–232.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Perempuan dan Laki-laki di Indonesia*.
- Djumadi. (2016). KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM. *Tabkim*, XII(1), 1–16.
- Erianjoni. (2014). PELABELAN ETNIS MINANGKABAU PADA WANITA PELAKU PENYIMPANGAN SOSIAL DI KOTA PADANG. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 4(1), 124–140.
- Hasan, A. (2016). ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN. *Jurnal Ekonomi*, 1(1), 33–43.
- Landhiani, J. N. (2022). *Inilah 7 Negara Paling Aman di Dunia Tahun 2022, Tertarik Pindah?*
- Marthalina. (2018). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) DI INDONESIA. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 3(1), 59–76.
file:///C:/Users/WINDOWS

- 8.1/Downloads/862-Article
Text-2289-3-10-20200207.pdf
- Nasrulloh, & Hafidh, A. N. (2021). EKSISTENSI WANITA KARIER DI ERA PANDEMI: ANTARA KEBUTUHAN DAN PELUANG. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(2), 217–227.
- Nirmalasari, S. A., & Putri, N. (2022). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH JASSER AUDA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 1(1), 43–53.
- Novianti, L. (2016). PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK. *Marwah, Jurnal Perempuan, Agama dan Gender*, 15(1).
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia. *Nabhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68–79.
- Panjaitan, A. A., & Purba, C. S. (2018). TANTANGAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN DI INDONESIA: Meretas Ketidakadilan Gender. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 70–95.
- Qomar, M. N. (2019). Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan Bekerja (Hikmah Di Balik Surat Al-Qashash). *Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender*, 15(1), 24–33.
- Ratih, P. (2015). PEREMPUAN DAN PERANNYA DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (WOMEN AND ITS ROLE ON SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT). *NATAPRAJA: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1).
file:///C:/Users/WINDOWS
8.1/Downloads/11957-29116-1-SM
(2).pdf
- Reflianto, & Wandu, J. I. (2019). Career and Family: A Study of Women Leadership. *Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender*, 15(2), 81–88.
- Refliyanto, R. (2020). Wanita Dalam Pusaran Ekonomi: Migrasi Orang Yogyakarta ke Besuki Tahun 1930. *Jurnal Wanita dan Keluarga, Universitas Gajah Mada*, 1(1), 28–34.
- Rohmaniyah, I. (2009). GENDER DAN KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM AGAMA. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 10(2), 207–230.
- Safri, H. (2016). PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 102–112.
- Shintaloka Pradita Sisca. (2021). *Negara-negara dengan Tingkat Pemerksaan Tinggi dari Afrika Selatan hingga Rusia*.
- Tri Dewiyanti, K. (2012). KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI BIDANG POLITIK “PENTINGNYA PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF”

Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1), 73–90.

Umariana. (2016). PENGUATAN HAK ASASI PEREMPUAN DAN KESETARAAN GENDER MELALUI DIALOG WARGA. *Sawwa*, 12(1), 41–60.

Wahyuni, F. E., Riyanto, W. H., & Sulistyono, S. W. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020. *Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*, 5(3), 551–562.

Yoga, B. P. (2020). *GELATKAN UMKM INDONESIA, PEREMPUAN JADI PAHLAWAN EKONOMI KELUARGA*. KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2972/geliatkan-umkm-indonesia-perempuan-jadi-pahlawan-ekonomi-keluarga>